



## **PELAKSANAAN KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MORODEMAK DI KABUPATEN DEMAK**

Ricky Gradiyanto Mahottama\*, Amiek Soemarmi, Indarja  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [rickygradiyanto@gmail.com](mailto:rickygradiyanto@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pelabuhan Perikanan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Adapun permasalahan yang dikaji antara lain bagaimana pelaksanaan kedudukan, fungsi, dan tugas Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak. Penelitian ini bertujuan, diantaranya mengetahui Pelaksanaan Kedudukan, Fungsi dan Tugas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi beserta penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian yuridis empiris, spesifikasi yang digunakan deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan, metode analisis data yang digunakan metode kualitatif, serta metode penyajian data keseluruhan data yang telah terkumpul setelah dilakukan editing dan telah disusun secara terurur. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pelaksanaan fungsi, tugas dan kedudukan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak di Kabupaten Demak merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak merupakan pelabuhan perikanan tipe C yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang masuk kategori sederhana, kecil, di daerah relatif pelosok. Kendala-kendala yang dihadapi Pelabuhan Perikanan Pantai diantaranya pemangku kepentingan perikanan di PPP Morodemak kurang memiliki kepedulian akan peraturan yang ada dan fasilitas IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) belum tersedia secara maksimal, saluran drainase belum tertata dengan baik sarana penanganan sampah sementara belum ada.

**Kata Kunci : Pelabuhan Perikanan, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah**

### **ABSTRACT**

*Fishery Port is ideally consists of land and waters around it with certain limits as the activities of government and business system used fishing as a fishing boat rests, anchored, and / or unloading of fish that is equipped with the safety of shipping and fisheries support activities. The issues examined include how the implementation of the status, functions, and duties Morodemak Beach Fishing Port, and the constraints faced in the implementation of the tasks and functions of Fishery Port Morodemak Beach. This study aims, among others: Knowing Implementation Status, Functions and Duties of Coastal Fishing Port (PPP) Morodemak, and to know the constraints faced and their solutions. The method used by the researchers is the method of empirical juridical, specification used descriptive analysis, the method of data collection by field research, methods of data analysis used qualitative methods, as well as the method of data presentation all the data that has been collected after editing and have been drafted decomposes. The results obtained from this study is the implementation of the functions, duties and position of Fishery Port Beach (PPP) Morodemak in Demak is the Technical Implementation Unit at the Department led by Chief of Fishery Port Beach which is located under and responsible to the Head of Marine and Fisheries Java Central. Fishery Port Morodemak Beach is the fishing port of*

*C-type conducting technical, operational and technical support activities in the management of the Department of Fishery Port, which is categorized as a simple, small, in a relatively remote area. Constraints faced such Coastal Fishery Port fisheries stakeholders in PPP Morodemak have less concern for the existing regulations and facilities WWTP (Wastewater Treatment Plant) are not available to the maximum, drainage channels have not been well-organized waste handling facilities while yet.*

**Keywords:** *Fishing Port, Demak, Central Java Province*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia dilihat dari geografis merupakan Negara dengan persentase sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yang tergusur pulau-pulau besar dan kecil. Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.510 pulau.<sup>1</sup>

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua per tiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km dengan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup>. Kondisi geografis tersebut memberikan kekayaan berupa sumber daya laut dan ikan. Secara geografis, lautan Indonesia yang terletak di daerah katulistiwa dan beriklim tropis ternyata membawa konsekuensi akan kekayaan jenis-jenis maupun sumber daya perikanan. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanannya, dimana potensi perikanan bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun, potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun. Produk perikanan

tangkap di Indonesia pada tahun 2007 4.924.430 ton.

Provinsi Jawa Tengah mempunyai potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar. Garis pantai terbentang sepanjang 791,76 Km, terdiri atas panjang Pantai Utara 502.69 Km dan Panjang Pantai Selatan 289.07 Km, belum termasuk pulau-pulau kecil yang jumlahnya mencapai 34 buah. Selain itu Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pengembangan usaha perikanan laut. Di Laut Jawa, kaya akan jenis-jenis ikan pelagis kecil (*small pelagic*) dan ikan demersal dengan potensinya sebesar 796.640 ton/tahun.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pendaratan Ikan merupakan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk menunjang kelancaran pembangunan perikanan, terutama untuk mempermudah usaha perikanan rakyat melalui tempat pelelangan ikan. Seluruh kegiatan tersebut merupakan kegiatan ekonomi perikanan yang dilakukan oleh masyarakat perikanan umumnya dan masyarakat nelayan khususnya, agar dapat berkembang sesuai dengan arah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pelabuhan perikanan adalah prasarana perikanan dalam usaha yang fungsinya sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, pusat kegiatan ekonomi perikanan

---

<sup>1</sup>sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan, *Loka Karya Nasional Pengolahan Jasa Kelautan dan Kemaritiman*, (Jakarta:Hotel Bumi Karsa Bidakara, 19 Juni 2007), hlm.1.

(produksi, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, pangkalan armada perikanan). Jadi pelabuhan perikanan akan mendukung segenap usaha perikanan, termasuk dalam proses modernisasi nelayan tradisional serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Namun semua itu memerlukan suatu pengelolaan yang baik. Pengelolaan pelabuhan perikanan yang baik akan menunjang kelancaran operasi perikanan, pengolahan, maupun pemasarannya sehingga menjadi lebih terjamin. Disamping itu seluruh kegiatan masyarakat nelayan akan dapat dikonsentrasikan di pelabuhan perikanan, sekaligus berpengaruh positif terhadap pengembangan daerah-daerah di sekitarnya.<sup>2</sup>

Berbagai usaha pembangunan di bidang kelautan dan perikanan terutama diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dengan peningkatan pendapatan serta pelabuhan status sosial. Dalam rangka upaya pembangunan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup nelayan, pemerintah telah membangun sejumlah pelabuhan perikanan yang berfungsi selain sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan juga bertujuan untuk memperlancar kegiatan usaha penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan ikan nasional yang terus

meningkat seiring dengan meningkatnya sarana dan prasarana di bidang ekonomi. Indonesia memiliki pelabuhan perikanan yang tersebar di seluruh penjuru tanah air sebagai salah satu elemen penting dan strategis dalam pengembangan sub-sektor perikanan tangkap.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Pelabuhan Perikanan, fungsi pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan tempat labuh perikanan, pendaratan ikan, pemasaran distribusi ikan, pelaksanaan pembinaan mutu, memperlancar kegiatan operasional perikanan, dan pelaksanaan kesyahbandaran.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan, pelabuhan perikanan adalah tempat berlabuh kapal perikanan dimana kapal-kapal yang sedang mengisi bahan bakar, perbekalan, perbaikan, dan bongkar muat ikan yang di dalamnya terdapat beberapa fungsi diantaranya adalah fungsi pokok, diantaranya pusat pengembangan masyarakat nelayan, tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan, pusat penanganan dan pengolahan mutu hasil perikanan, pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, pusat penyuluhan dan pengumpulan data, serta pusat pengawasan penangkapan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan.

---

<sup>2</sup>Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol. 3, No. 4, *Analisis Indeks Kinerja Pengelola dan Indeks Kepuasan Pengguna Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman* Jakarta, Desember 2012

Pelabuhan Perikanan mempunyai klasifikasi tersendiri yang membedakan pelabuhan yang satu dengan pelabuhan yang lain. Perbedaan ini berdasarkan luas wilayah cakupan, sarana, dan prasarana yang dimiliki, frekuensi, dan volume ikan yang didaratkan serta luasan pelayanannya. Pelabuhan Perikanan diperlukan dalam rangka menunjang usaha motorisasi serta pengembangan ekonomi perikanan secara menyeluruh terutama menunjang perkembangan industri perikanan baik hulu maupun hilir, sehingga diharapkan akan tercapai pemanfaatan sumberdaya yang seimbang dan merata.<sup>3</sup>

Pelabuhan Perikanan yang ada di wilayah Kabupaten Demak termasuk dalam klasifikasi Pelabuhan Perikanan Pantai ( PPP ), mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan produksi perikanan, memperlancar arus lalu lintas kapal khususnya kapal perikanan, mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya ikan serta mempercepat pelayanan terhadap seluruh kegiatan di bidang usaha perikanan.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tak langsung seperti : pedagang, pabrik pengolah, restoran, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Pelabuhan Perikanan Pantai yang berfungsi dengan baik akan menjadi titik temu yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi di darat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Pelaksanaan Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kabupaten Demak**

#### RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis diatas, penulis akan merumuskan permasalahan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kedudukan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak beserta penyelesaiannya ?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*,

<sup>3</sup>Mangrove dan Pesisir Vol. VI No.1, *Studi Fasilitas Pelabuhan Perikanan Dalam Rangka Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Sumatera Barat*, 2006

karena pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>5</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh.<sup>6</sup>

Metode Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 45.

<sup>6</sup> Hadari Nawawi & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994), hlm. 73.

<sup>7</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 38.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kabupaten Demak**

Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak dengan sarana dan prasarana yang tersedia guna melayani dan memberikan fasilitasi usaha bidang kelautan dan perikanan dibentuk melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 38 tahun 2008, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak terletak pada 110° 32' 40" BT dan 6° 49' 30" LS, di Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan luas 3,9 ha dengan panjang pantai 34,1 km. Perairan Morodemak merupakan laut tempat muara dari Sungai Tuntang Lama.

Aktivitas perikanan tangkap di PPP Morodemak cukup berkembang meski armadanya masuk kedalam golongan nelayan skala kecil atau armada semut yang ditandai dengan ukuran kapal < 30 GT serta beroperasi dalam satu hari menangkap (one day fishing) oleh karena itu Kabupaten Demak masuk kedalam Program Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu SEKAYA MARITIM (Seribu Kampung Nelayan Mandiri, Tangguh, Indah dan Maju).

Program tersebut dalam upaya penataan lingkungan pemukiman nelayan serta penataan di lokasi PPP Morodemak dan dilaksanakan di Tahun 2015 dengan alokasi anggaran Tugas Pembantuan (TP) Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Demak. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan di tahun 2015 ini baik kegiatan yang mendapat dukungan APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Demak, APBN maupun dukungan dari instansi terkait untuk itu Laporan Tahunan ini disusun guna memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan, capaian, permasalahan dan rencana tindak yang akan dilakukan oleh PPP Morodemak.

Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dibentuk melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 38 tahun 2008 dan Perjanjian kerjasama antara Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Demak No. 36/2010, dan No. 523/045 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pengolahan dan Pengembangan PPP Morodemak. Perjanjian Kerjasama antara DKP Provinsi Jawa Tengah dan DKP Kabupaten Demak No. 523/1956/2010 dan No. 523/882 tanggal 15 Desember 2010 tentang Pengolahan dan Pengembangan PPP Morodemak.

Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, berada di desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan luas 3,9 ha dengan sarana dan prasarana yang tersedia guna melayani dan memberikan fasilitasi usaha bidang kelautan dan perikanan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dengan Tugas Pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan dibidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak adalah pelabuhan perikanan yang masuk kategori sederhana, simpel, kecil, di daerah relative pelosok dan hanya melayani armada perikanan tangkap skala kecil atau lebih dikenal dengan armada semut yang melakukan usaha penangkapan dalam satu hari (*one day fishing*). Kondisi demikian tidak menyurutkan para aparatur yang bertugas di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak untuk tetap berkreaitif dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Pelabuhan Perikanan yang berarti dan dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perikanan, untuk itu Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak melakukan kegiatan-kegiatan inovatif melalui koordinasi dengan instansi terkait dalam bentuk hubungan sinergi.

Sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai Unit Pelaksana Teknis Daerah tentunya masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan, diperbaiki dan dibangun agar menjadi Pelabuhan Perikanan yang ideal dan yang pasti memberikan pelayanan bagi aktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Demak khususnya serta Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

## **B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak**

### **B.1 Kedudukan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak**

Kedudukan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) disebut juga pelabuhan perikanan tipe C atau kelas III. Pelabuhan tipe ini mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan yang berukuran sekurang-kurangnya 10 GT, panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m. Pelabuhan ini dirancang untuk menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT. Lahan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh pelabuhan perikanan tipe ini sekurang-kurangnya 5 ha. Dalam pelabuhan perikanan ini terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari serta terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

### **B.2. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak**

Susunan organisasi (PPP) Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Sesuai dengan Peraturan

Gubernur Nomor 38 Tahun 2008 sebagai berikut :

1. Kepala Pelabuhan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan persiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan Pelabuhan Perikanan Pantai.
3. Kepala Seksi Tata Pengusahaan. Kepala Seksi Tata Pengusahaan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pelaksanaan kegiatan tata pengusahaan Pelabuhan Perikanan Pantai.
4. Kepala Seksi Tata Pelayanan dan Kesyahbandaran. Kepala Seksi Tata Pelayanan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan persiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan tata pelayanan dan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai.
5. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing, namun saat ini belum ada pejabat pada Jabatan Fungsional.

### **B.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak**

Kegiatan-kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak yang dijabarkan di setiap bagian dan seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di dalam melaksanakan tugasnya juga menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;

- b. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- c. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- d. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- e. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- f. Pelaksanaan kesyahbandaran;
- g. Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- h. Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- i. Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- j. Pemantauan wilayah pesisir;
- k. Pengendalian lingkungan;
- l. Kepabeahan; dan/atau
- m. Keimigrasian;
- n. Pelayanan bongkar muat ikan;
- o. Pemasaran dan distribusi ikan;
- p. Pelayanan tambat dan labuh perikanan;

### **C. Kegiatan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak**

#### **C.1. Kegiatan Seksi Tata Pelayanan dan Kesyahbandaran**

Berdasarkan fungsi dan tugas seksi Tata Pelayanan dan Kesyahbandaran, yakni membuat data statistik pelabuhan perikanan dan hasil tangkap setiap bulan, diperoleh data capaian selama tahun 2015 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dimana produksi tangkapan yang didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), nilai produksi hasil tangkapan, jumlah Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan, jumlah Surat Laik Operasional (SLO) yang dikeluarkan, retribusi/pendapatan

yang diperoleh serta penilaian kinerja Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP).

#### **C.2. Kegiatan Seksi Tata Pengusahaan**

Berdasarkan fungsi dan tugas seksi Pengusahaan, yakni kegiatan dengan pertemuan bakul ikan yang menempati kios, pembinaan terhadap nelayan dan bakul ikan, pembinaan kewirausahaan wanita nelayan dan pengolahan ikan, melakukan koordinasi keamanan di kawasan pelabuhan perikanan.

##### **1. Pembinaan Nelayan dan Bakul Ikan;**

Melibatkan narasumber dari UNNES untuk memberikan motivasi Usaha Skala Kecil yang mampu bersaing, pada tanggal 11 September 2015 diikuti 30 orang peserta dilaksanakan di Ruang Pertemuan PPP Morodemak;

##### **2. Pembinaan Kewirausahaan Wanita Nelayan dan Pengolah Ikan ;**

Melibatkan narasumber dari UNNES dan pengrajin batik mangrove dengan materi pengenalan batik yang menawan. Hal ini perlu ditumbuh kembangkan agar buah mangrove dapat dimanfaatkan dengan baik dan meningkatkan pendapatan para wanita nelayan, diikuti 30 orang peserta pada tanggal 26 Agustus 2015 di Ruang PAUD Desa Morodemak Kecamatan Bonang;

##### **3. Pelatihan nelayan dalam mendukung pengolahan perikanan rajungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro (FPIK)-UNDIP bekerjasama dengan NOAA – US (National Oceanic and Atmospheric Administration United State of America) yaitu Lembaga Nasional Kelautan dan Atmosfir Amerika**

Serikat yang didedikasikan guna melindungi kelestarian sumber daya kelautan melalui kegiatan riset, pengelolaan perikanan, penegakan hukum dan konservasi habitat) dengan Lembaga Pengelolaan Perikanan Rajungan Lestari (LP2RL) yang pada kesempatan ini NOAA memfokuskan bagaimana menjaga kelestarian Rajungan di perairan melalui pengelolaan perikanan yang terkendali dan ramah lingkungan, selanjutnya para peserta dilatih bagaimana perencanaan pengelolaan rajungan yang baik dan benar serta lestari, diikuti dari 25 orang peserta berasal dari:

-Nelayan dan Wanita Nelayan Tambakpolo Desa Purworejo, Kab. Demak

-Nelayan dan Wanita Nelayan Desa Betahwalang, Kab. Demak

-Nelayan dan Wanita Nelayan Desa Sukorejo, Kab Rembang

4. Koordinasi keamanan di kawasan Pelabuhan Perikanan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi sosialisasi keselamatan berlayar, koordinasi lintas sektor, pembinaan nelayan dan bakul, pembinaan kewirausahaan wanita nelayan dan pengolah ikan, bersih lingkungan dan pembinaan K5 (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan dan Keselamatan Kerja), tersaji pada tabel berikut. Disamping itu bersama instansi terkait PPP Morodemak melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai lokasi kunjungan lapangan, lokasi uji terap alat bantu penangkapan dan kunjungan lapangan bagi UPT Provinsi lain;

b. Kerjasama dengan Dinas Perhubungan Informasi dan Telekomunikasi Kabupaten Demak masalah pengurusan PAS Besar maupun Pas Kecil;

c. Kerjasama dengan PT Awnusa dan AKR yang merupakan pengelola SPDN baik di Morodemak maupun Wedung;

d. Secara rutin bersama POS AL, Polair, dan Pengawas SDKP melaksanakan operasi pengawasan terhadap kelengkapan dokumen kapal untuk keamanan didalam melaut;

e. Kegiatan syawalan yaitu pesta laut yang dilaksanakan sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri bersama para pemangku kepentingan di Kabupaten Demak;

f. Pameran usaha pengolahan hasil perikanan di PPP Morodemak.

g. Bakti Sosial pelayanan kesehatan gratis bekerja sama dengan Djarum Foundation dengan TNI AL bagi para nelayan dan keluarganya di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak.

#### **D. Hambatan - Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak**

1. Kondisi sedimentasi Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di muara sungai Tuntang Lama berakibat kapal/perahu nelayan tidak dapat dengan mudah masuk ke lokasi untuk bersandar dan melakukan bongkar muat hasil tangkapan.

2. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak mengalami penurunan tanah sehingga memerlukan peninggian di beberapa lokasi tertentu

termasuk peninggian lantai beberapa bangunan fasilitas penunjang.

3. Terbatasnya anggaran untuk operasional dan pemeliharaan fasilitas - fasilitas yang disediakan.

#### **Upaya Pemerintah dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak**

1. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi permasalahan sedimentasi.
2. Koordinasi dengan kementerian kelautan dan perikanan berkaitan dengan upaya penanganan fisik Pelabuhan Perikanan Morodemak melalui dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus Kabupaten demak terkait status asset tanah milik kabupaten demak
3. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan PPP Morodemak untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan ketertiban, keindahan, keamanan, keselamatan dan kebersihan lingkungan PPP Morodemak

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dibentuk melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 38 tahun 2008 dan Perjanjian kerjasama antara Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Demak No. 36/2010, dan No. 523/045 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pengolahan dan Pengembangan PPP Morodemak. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak No. 523/1956/2010 dan No. 523/882 tanggal 15 Desember 2010 tentang Pengelohan dan Pengembangan PPP Morodemak. Pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa dan operasional pelabuhan perikanan, mendukung pertumbuhan dan pengembangan unit bisnis perikanan terpadu, dan melaksanakan sistem informasi perikanan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dengan Tugas Pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan dibidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai serta

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Dasar hukum Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak adalah Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.

2. Berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yang dalam tugas pokok dan fungsi serta operasionalnya mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang ditekankan pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan, ketertiban di lokasi Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, Kondisi sedimentasi Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di muara sungai Tuntang Lama berakibat kapal atau perahu nelayan tidak dapat dengan mudah masuk ke lokasi untuk bersandar dan melakukan bongkar muat hasil tangkapan, Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak mengalami penurunan tanah sehingga memerlukan peninggian di beberapa lokasi tertentu

termasuk peninggian lantai beberapa bangunan fasilitas penunjang, fasilitas IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) belum tersedia secara maksimal, saluran drainase belum tertata dengan baik, sarana penanganan sampah sementara belum ada. Namun Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak juga telah melakukan upaya pemecahan masalah, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum., *Buku Ajar Hukum Perikanan*, (Semarang: UNDIP LAW PRESS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2016)
- Ayodhya, *Lokasi dan Fasilitas Pelabuhan Perikanan*, (Bogor: Bagian Penangkapan Ikan Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor, 1975)
- Bambang Murdyanto, *Pelabuhan Perikanan*, (Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, 2004)
- Capt. R.P. Suyono, *SHIPPING " Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut " Seri Bisnis Internasional No 6*, Jakarta : Penerbit PPM, 2001
- Direktorat Jenderal Perikanan, *Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Pelabuhan Perikanan*, (Jakarta: Departemen Pertanian, 1994)
- H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- H.Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme*



- bagai suatu Alternatif, (Jakarta:Rajawali Press,2002)
- Juana, *Hukum Pemerintah Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: PT. Alumni Bandung,2004)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni Bandung, 1976)
- Lubis,E. *Pengantar Pelabuhan Perikanan, Laboratorium Pelabuhan Perikanan*, (Bogor: Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan,IPB Bogor,2000)
- Ludiro Madu, Aryanta Nugraha, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas,Isu,Pernasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2010)
- M.Syamsudin,*Operasionalisasi Penelitian Hukum*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007)
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003)
- P.Joko Subagyo,*Metode Penelitian*,cetakan kelima,(Jakarta:PT.Rineka Cipta,2006)
- Rinitami Njatrijani, *Hukum Transportasi*, (Semarang: UNDIP LAW PRESS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO,2015)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI Press,1984)
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*,(Jakarta: Rajawali Press, 2003)
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003)
- Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta: Universitas Atma Jaya,2007)
- Jurnal**
- Jurnal Akuatika Vol. IV No. 1, *Strategi Pengembangan Investasi Di Sekitar Pelabuhan Perikanan Tipe B Di Jawa Barat*,Maret 2013, hlm 89-101
- Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol. 3, No. 4,*Analisis Indeks Kinerja Pengelola dan Indeks Kepuasan Pengguna Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta*, Desember 2012
- Mangrove dan Pesisir Vol. VI No.1,*Studi Fasilitas Pelabuhan Perikanan Dalam Rangka Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Sumatera Barat*,2006
- Marine Fisheries, Vol.2, No.1,*Formulasi Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Jembrana*, Mei 2011, hal 87-89
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Peraturan Permerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.12/MEN/2004



tentang Peningkatan Status  
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)  
menjadi Pelabuhan Perikanan  
Pantai (PPP) pada Provinsi Jawa  
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur  
dan Lampung

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008  
Tentang Struktur Organisasi dan  
Tata Kerja DKP Prov Jateng .

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 38  
Tahun 2008 Tentang Unit  
Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas  
Kelautan dan Perikanan Provinsi  
Jawa Tengah